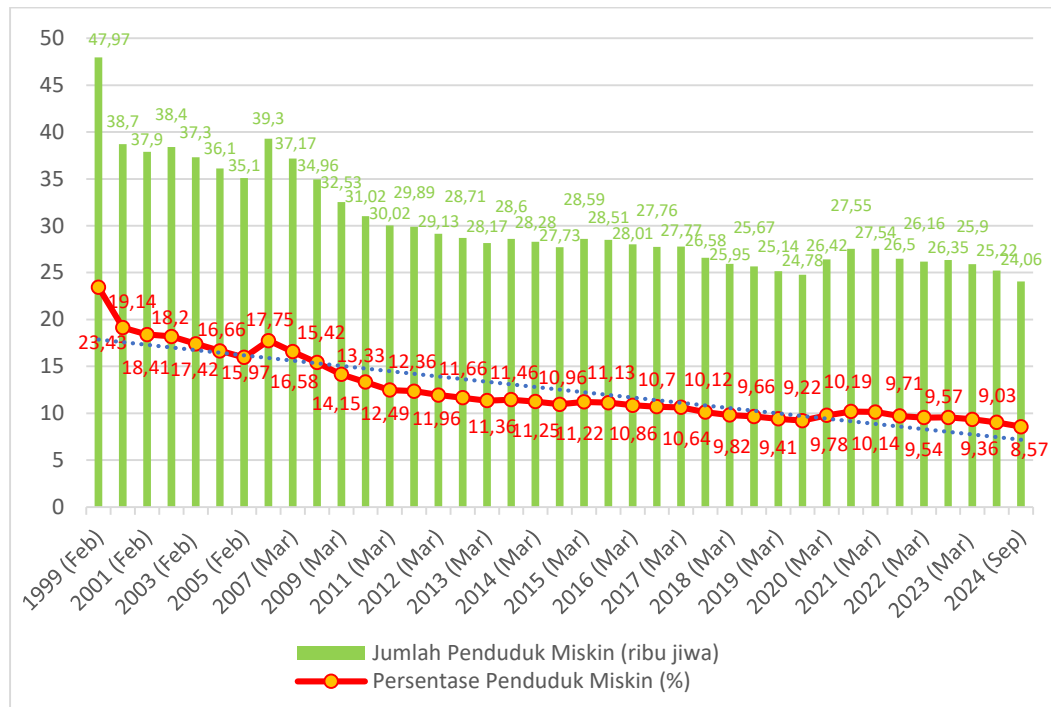


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya memiliki sejumlah permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya yang perlu diperhatikan lebih lanjut, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan tersebut (Wulandari et al., 2022). Dalam penyusunan dan pembuatan kebijakan pembangunan, kemiskinan selalu menjadi perhatian utama pemerintah (Alfisyahrin, 2021). Sejak kemerdekaan, Indonesia telah menghadapi kemiskinan sebagai permasalahan struktural dan masih menjadi masalah utama dalam pembangunan nasional. Pada masa reformasi kemiskinan mencapai titik terparahnya karena krisis ekonomi 1998 yang mendorong lonjakan angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS angka kemiskinan di Indonesia yang melonjak tersebut dari sekitar 17,47% dengan 34,01 juta jiwa pada tahun 1996, kemudian naik menjadi 24,2 persen dengan 49,5 juta jiwa pada tahun 1998. Adapun tingkat kemiskinan di Indonesia yang meliputi besaran jumlah dan persentase penduduk miskin rentang dari tahun 1999 - September 2024.



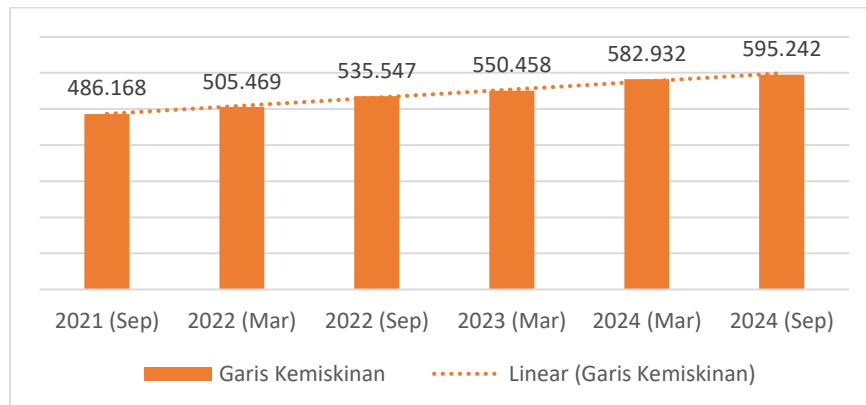
Gambar 1. 1 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, Februari 1999 - September 2024

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2025)

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa setelah tahun 1999 tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan pola fluktuatif dengan tren cenderung menurun. Dalam hal ini, mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan secara bertahap. Tingkat kemiskinan di Indonesia rentang tahun 1999 – September 2024 yang cenderung turun mengalami beberapa tren kenaikan. Terjadi peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2006, menurut data BPS disebabkan oleh pergeseran posisi kelompok penduduk di sekitar garis kemiskinan rentang periode Februari 2005 – Maret 2006. Hal tersebut mencerminkan tingginya tingkat kemiskinan sementara (*transient poverty*) cukup besar di Indonesia. Selanjutnya, data menunjukkan kenaikan pada

beberapa periode tertentu, penyebabnya adalah setelah adanya kenaikan bahan bakar minyak yang menyebabkan barang kebutuhan pokok naik juga. Kenaikan pada periode Maret 2015 dan September 2020 terjadi dengan adanya guncangan ekonomi yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 dan pendapatan masyarakat terutama bagi golongan masyarakat miskin dan rentan. Penurunan tingkat kemiskinan setelah pandemi mencerminkan adanya pemulihan yang perlahan berjalan. Peran kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengentaskan kemiskinan, tidak adanya korupsi dan kebocoran anggaran pasti kemiskinan akan terus menurun. Tingkat kemiskinan di Indonesia dengan tren menurun tetap menjadi tantangan struktural yang memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kategorisasi pendapatan untuk menentukan apakah individu dapat dikatakan miskin atau tidak di Indonesia mengacu pada garis kemiskinan (GK) berdasarkan penetapan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan seseorang agar tidak dikategorikan miskin. Adapun perkembangan garis kemiskinan di Indonesia sebagai berikut.



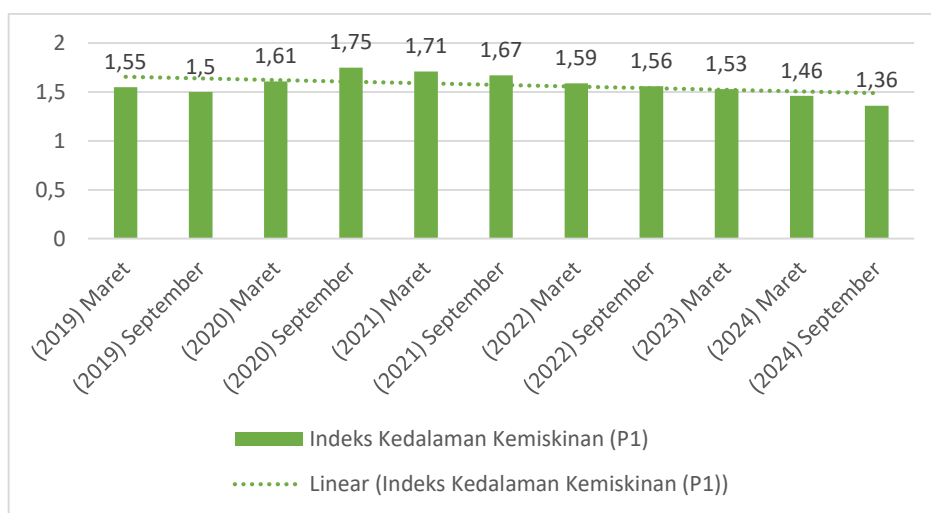
Gambar 1. 2 Perkembangan Garis Kemiskinan September 2021 – Maret 2024

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024)

Berdasarkan data tersebut, bahwa pada September 2024 individu yang pendapatannya di bawah Rp 595.242,- per kapita per bulan dapat dianggap sebagai orang miskin secara ekonomi. Kenaikan garis kemiskinan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan pemenuhan biaya hidup minimum masyarakat agar tidak dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan yang terus meningkat, sedangkan kemampuan pendapatan masyarakat tak kunjung naik, mengakibatkan disparitas pendapatan yang tinggi yang terus membatasi potensi pertumbuhan inklusif. Akibatnya, kelompok masyarakat miskin sulit terangkat dari kemiskinan. Kondisi ini menggambarkan tantangan signifikan yang dihadapi kelompok masyarakat miskin dan rentan, terutama di tengah upaya Indonesia untuk ke luar dari *middle income trap*, yaitu kondisi ketika negara kelas menengah dalam jangka waktu tertentu tidak dapat meningkatkan pendapatannya (Widyastuti & Khoirudin, 2023). Negara seperti Indonesia perlu berinovasi agar dapat ke luar dari kategori pendapatan menengah, hal tersebut perlu didukung peningkatan

kemampuan masyarakat dalam berkontribusi terhadap ekonomi dan menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi yang merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan berkeadilan sosial.

Indeks Kedalaman Kemiskinan juga dikenal sebagai *Poverty Gap Index/P1* adalah ukuran perbedaan rata-rata pengeluaran setiap orang yang dianggap miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilainya, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk di garis kemiskinan. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit (BPS, 2025). Adapun perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia dari Maret 2019 hingga September 2024.

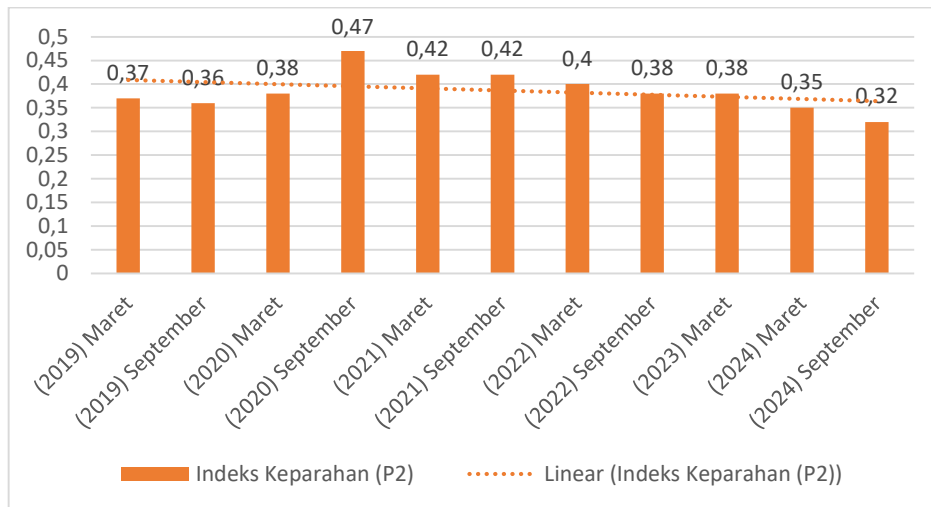


Gambar 1. 3 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Indonesia, Maret 2019-September 2024

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2025)

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuatif dengan kecenderungan tren menurun. Pada Maret 2020 dan September 2020 mengalami penambahan dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2020 menjadi lebih tinggi daripada tahun 2019. Kenaikan tajam P1 pada tahun 2020 ini mencerminkan dampak signifikan dari adanya pandemi Covid-19 serta lemahnya respons awal kebijakan penanggulangan kemiskinan pada masa krisis. Hal ini menunjukkan bahwa ketetapan waktu, akurasi data, dan kesiapan birokrasi sangat berpengaruh terhadap P1.

Selain adanya Indeks Kedalaman Kemiskinan, terdapat juga Indeks Keparahan Kemiskinan yang dikenal juga sebagai *Poverty Severity Index/P2* merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka akan semakin tinggi juga ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Adapun perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia dari Maret 2019 hingga September 2024.



Gambar 1. 4 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia, Maret 2019 - September 2024

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2025)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2025, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia pada Gambar 1.3 menunjukkan bahwa pada September 2020 mencapai nilai tertinggi sebesar 0,47, hal ini bertepatan dengan munculnya pandemi Covid-19. Peningkatan P2 menunjukkan bahwa kelompok miskin mengalami penurunan kesejahteraan lebih parah dibandingkan dengan kelompok penduduk lainnya. Selain itu, mencerminkan ketimpangan yang tajam di dalam populasi penduduk miskin. Peningkatan P2 menunjukkan ketidakseimbangan dalam bagaimana program bantuan diterapkan pada masa krisis awal pandemi. Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan tampak belum mampu menjangkau kelompok miskin secara merata.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah berubah seiring waktu dengan menyesuaikan setiap rezim pemerintahan. Dalam menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan sejak lama, bahkan di

bawah kepemimpinan Soekarno di Orde Lama (Saribulan et al., 2023). Pasca terjadinya krisis ekonomi 1998 di Indonesia, pemerintah terus mengupayakan untuk bisa menangani angka kemiskinan yang sempat melonjak. Dalam bukunya Wirata (2022) secara ringkas menguraikan berbagai macam kebijakan yang diambil sebagai upaya penanggulangan kemiskinan sesuai era presiden yang menjabat pada masa reformasi sebagai berikut:

1. Era Presiden Habibie, pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian pasca krisis ekonomi 1998 dengan pengendalian harga barang dan jasa, meningkatkan pendapatan masyarakat, menetapkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) sebagai penyempurna program IDT, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai kelanjutan dari IDT dan P3DT.
2. Era Presiden Gusdur, Kredit Ketahanan Pangan, melanjutkan program JPS dan P2KP.
3. Era Presiden Megawati, Pembentukan forum koordinasi lintas sektor melalui Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan melanjutkan P2KP.
4. Era Presiden SBY, sebagai lanjutan dari adanya KPK dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Bantuan Langsung Tunai (BLT), melanjutkan program PPK dan P2KP, mengembangkan Program Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, ditetapkan Strategi Nasional Penanggulangan kemiskinan (SNPK) yang diintegrasikan menjadi dokumen

RPJM Tahun 2004-2009 dan dilanjutkan dengan RPJMN Tahun 2010-2014 sesuai Perpres RI Nomor 5 Tahun 2010.

Menurut Wirata (2022) banyaknya program intervensi penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah hanya berjalan sementara karena dilaksanakan berdasarkan pendekatan proyek .

Pada masa pemerintah Presiden Joko Widodo terbagi menjadi dua periode penting. Pada periode pertama kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kala (2014-2019) dalam mengentaskan kemiskinan menetapkan berbagai strategi yang diuraikan oleh Wirata (2022) di antaranya: 1) Memperbaiki program perlindungan sosial; 2) Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar; 3) Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan 4) Menciptakan pembangunan yang inklusif. Didukung Perpres Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan menetapkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat. Efektivitas dan konsistensi implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dinamika politik, di mana periode pertama Presiden Jokowi menghadapi situasi *divided government*. Pemerintah yang terbelah (*divided government*) antara legislatif dengan eksekutif karena sebagian besar anggota legislatif mengambil tindakan politik berbeda dengan presiden sehingga dukungan legislatif makin sulit didapatkan (Setiawan, 2021). Selain itu, berdampak terhadap perpecahan antara kepentingan politik dan misi yang tidak sejalan, bahkan saling bertentangan dalam proses pembuatan kebijakan (Pasaribu, 2023). Dalam hal ini, *divided goverment* pada periode pertama masa pemerintahan Presiden Jokowi menyebabkan pelaksanaan

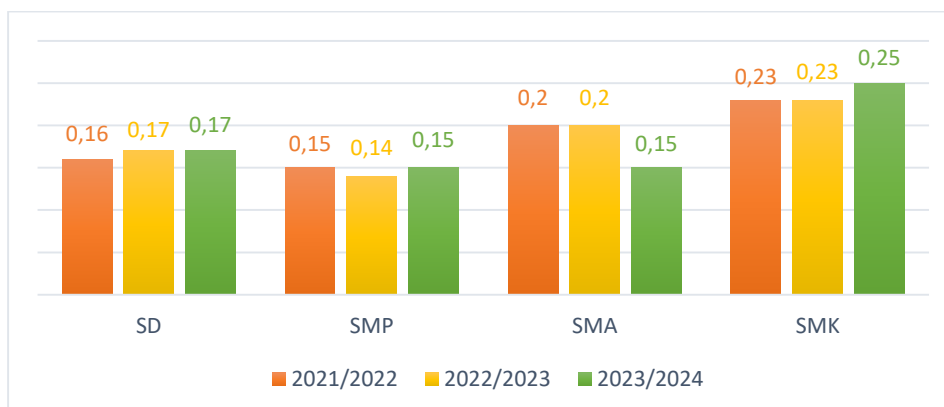
kebijakan-kebijakan tidak berjalan optimal termasuk kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu, pada periode kedua kepemimpinan Joko Widodo – Ma'aruf Amin (2019-2024) adanya pandemi Covid-19 meningkatkan angka kemiskinan dan berdampak banyak sektor terutama sektor ketenagakerjaan yang menyebabkan penurunan angka penyerapan tenaga kerja (Suardini et al., 2025). Dalam buku Wirata (2022) menguraikan usaha pemerintah pada masa pandemi Covid-19 untuk menyokong masyarakat miskin yang terdampak, yakni melalui Program Non-Reguler dan Program Reguler sebagai berikut: 1) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa; 2) Bantuan Sosial Sembako untuk wilayah Jabodetabek; 3) Bantuan Sosial Tunai; 4) Pembebasan Biaya Listrik; 5) Kartu Prakerja; 6) Program Keluarga Harapan (PKH) peserta bertambah; dan 7) Kartu Sembako. Pandemi Covid-19 menuntut respon cepat pemerintah untuk menentukan kebijakan yang luar biasa. Sementara itu, pada periode kedua stabilitas politik meningkat karena Presiden Jokowi berhasil membentuk *unified government*, yakni kesatuan pandangan pemerintah (*unified government*) dengan menempatkan legislatif satu misi reformis dan meredam politik sejak awal (Pasaribu, 2023). Kondisi ini membuka peluang konsolidasi kekuasaan yang mendukung konsistensi pelaksanaan kebijakan, termasuk upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Dalam penelitian ini, fokus pada kebijakan penanggulangan kemiskinan dipilih karena kemiskinan adalah masalah fundamental dibandingkan kebijakan lain, ditunjukkan dengan munculnya amanat UUD RI 1945 Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal

tersebut menegaskan bahwa negara mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan untuk pemenuhan kebutuhan dasar tanpa adanya diskriminasi. Dalam upaya mengurangi kemiskinan melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan untuk mengembangkan diri melalui pemberdayaan masyarakat (Najwa et al., 2024). Selain itu, kebijakan ini mampu berdampak dalam peningkatan akses pelayanan dasar kepada penduduk miskin. dan berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian negara (Wirata, 2022). Pada dasarnya kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan sosial yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan merupakan persoalan akar yang dapat memicu masalah sosial lainnya, seperti banyak anak-anak putus sekolah, banyak pengangguran yang bisa memicu kriminalitas serta kesehatan buruk dengan kekurangan gizi (Piliang, 2023). Salah satu faktor kebanyakan anak putus sekolah adalah karena faktor ekonomi orang tua mereka. Anak yang hidup dalam kemiskinan generasi demi generasi sering kali memengaruhi kesejahteraan mereka sehingga beresiko putus sekolah dan terlibat dalam perilaku yang merugikan. Menurut Haniyah (2023) bahwa kemiskinan keluarga dan pekerja anak merupakan dua kutub yang saling berhubungan, keterbasan ekonomi keluarga mampu mendorong anak untuk membantu orang tuanya bekerja setelah tidak dapat melanjutkan sekolahnya.



Gambar 1. 5 Angka Putus Sekolah Tiap Jenjang Pendidikan Tahun

2021/2022 - 2023/2024

Sumber: (Kemdikbud RI, 2024)

Diketahui bahwa APS tertinggi di Indonesia berada di tingkat SMK dan SMA, hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pendidikan rata-rata yang dicapai oleh masyarakat Indonesia masih setara dengan pendidikan SMP. Individu yang putus sekolah memiliki kesempatan pasar kerja formal yang sempit karena tidak memiliki kualifikasi atau ijazah yang sesuai. Kenyataan di masyarakat, mereka yang memiliki pendidikan rendah dan kurang terampil akhirnya cenderung mencari pekerjaan di sektor informal (Haniyah, 2023). Pendidikan yang terbatas memperkecil peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang cukup layak. Dibutuhkan kualitas pendidikan yang berkualitas sehingga berdampak terhadap peluang individu untuk keluar dari kemiskinan.

Lapangan kerja yang tersedia terbatas karena membutuhkan keterampilan khusus menyebabkan banyak pengangguran muncul sebagai akibat tidak dapat memenuhi kualifikasi kerja. Keterampilan yang memadai didukung oleh tingkat pendidikan yang telah diselesaikan minimal jenjang SMA/SMK. Dari

pengangguran ini muncul kriminalitas yang ujungnya menimbulkan keresahan sosial dan ketidakamanan (Piliang, 2023). Masyarakat dalam jurang kemiskinan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga rela melakukan berbagai cara untuk memenuhinya, termasuk melakukan tindak kriminalitas. Individu yang hidup dalam kondisi kemiskinan sering kali merasa frustrasi karena keterbatasan ekonomi, hal tersebut juga yang mendorong mereka melakukan tindak kriminalitas.

Selain itu, kemiskinan dapat menimbulkan masalah kesehatan buruk, seperti banyak warga yang sakit, kurang gizi, dan akhirnya meninggal dunia (Piliang, 2023). Terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mampu menghambat dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Pada faktor internal terdiri dari ekonomi, pengetahuan dan kesehatan. Sementara itu, faktor eksternal terdiri dari sarana prasarana, kondisi sosial budaya, kondisi geografi dan ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai (Lasso, 2023). Masalah-masalah sosial tersebut yang akan timbul ketika kemiskinan masih menjadi permasalahan suatu bangsa terutama Indonesia. Dampak yang luas dengan adanya kemiskinan, banyak masyarakat miskin yang dihadapkan dalam situasi keterbatasan dalam akses untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan yang berkualitas.

Efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi indikator penting dalam mengukur upaya pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Dibandingkan dengan kebijakan lain, kebijakan ini bersifat lintas sektor dan langsung menyentuh masyarakat pada lapisan terbawah. Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan upaya penanggulangan kemiskinan dengan berbagai

kebijakan dan program masih menghadapi tantangan dan penurunan belum terjadi secara signifikan. Hal tersebut didukung berdasarkan data yang diuraikan oleh Suardini et al., (2025) bahwa pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ditetapkan target penurunan kemiskinan, yakni pada periode pertama level 7-8% dan periode kedua level 6-7%. Namun, hingga akhir kepemimpinan target ini belum tercapai secara maksimal, penurunan angka kemiskinan hanya 9,22% pada September 2019 dan 8,57 pada September 2024 (BPS, 2025).

Lebih jauh, Indonesia cenderung mengalami ketertinggalan dalam pencapaian penurunan angka kemiskinan yang tepat dan terukur dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurut Piliang (2023) ketiga negara anggota ASEAN yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sama seperti Indonesia, seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand justru menunjukkan penurunan kemiskinan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga negara tersebut lebih responsif dan fokus dalam menangani isu-isu kemiskinan dibandingkan Indonesia sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan. Keberhasilan ini didukung oleh lingkungan ekonomi, sosial, politik, dan keamanan yang relatif stabil dan kondusif dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan kemiskinan. Perbandingan tersebut menegaskan bahwa pemerintah Indonesia perlu memperhatikan lebih serius dan terarah terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Dalam konteks Indonesia, pengentasan kemiskinan menjadi isu strategis utama pembangunan kewilayahan dalam Rencana Pembangunan Jangka

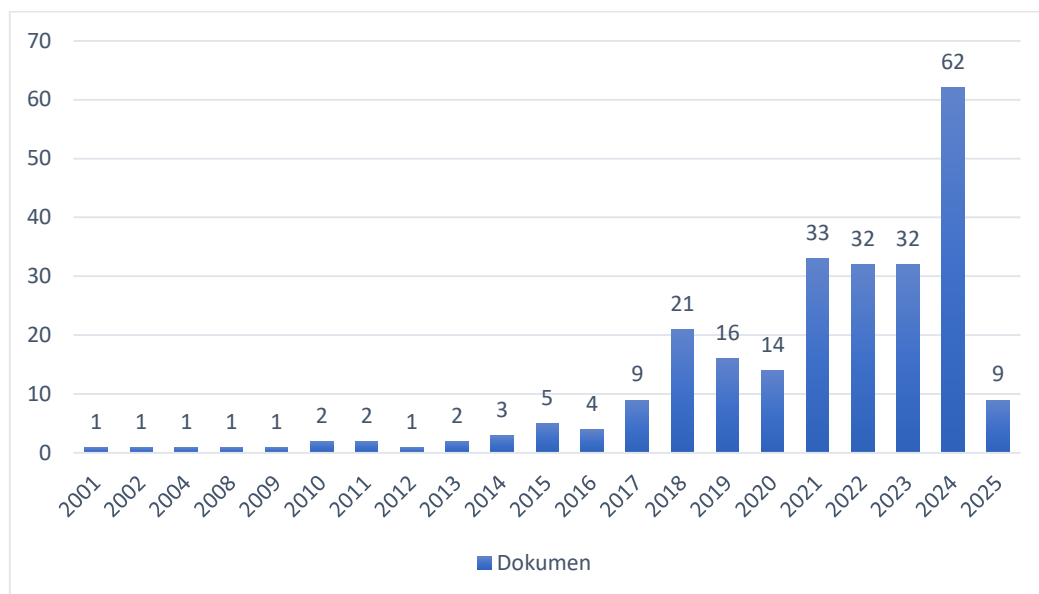
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pembangunan Indonesia ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang dapat berdaya saing dan berkualitas. Pemerintah Indonesia juga menunjukkan komitmen yang lebih kuat dengan tujuan mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Pemerintah memandang penting untuk segera melakukan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana kemudian diterjemahkan lebih lanjut kedalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, yang bertujuan untuk mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan akselerasi dan koordinasi lintas kelembagaan.

Pemerintah sebagai komitmennya dalam mempercepat pengurangan angka kemiskinan secara berkelanjutan diwujudkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dengan adanya inpres tersebut mampu mendukung upaya pemerintah dengan melibatkan 22 kementerian, 6 lembaga dan pemerintah daerah saling berkoordinasi dan bersinergi melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, dibentuk juga Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk membuat kebijakan dan program penanggulangan

kemiskinan dengan menguatkan sinergi dan memantau keberjalanan kebijakan yang dilaksanakan.

Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia gagal bukan karena desain kebijakan yang lemah, tetapi pada pelaksanaan kebijakan di lapangan yang kurang optimal. Hal tersebut karena pelaksanaan yang tidak sesuai prosedur dan ketidakmampuan pemerintah untuk menjalankan sistem, kebutuhan masyarakat miskin jauh di bawah harapan (Pohan & Khairani, 2025). Upaya penanggulangan kemiskinan banyak berupa pangan dan tunai. Penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial hanyalah mengatasi kebutuhan dasar (Piliang, 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan kajian yang sistematis untuk merumuskan faktor-faktor keberhasilan (*critical success factors*) dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia sehingga dapat mencapai tujuan kebijakan dengan optimal.

Penelitian tentang implementasi kebijakan dalam konteks kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah diterbitkan melalui database elektronik “Google Scholar” semakin meningkat dan menunjukkan perkembangan cukup pesat dari beberapa tahun terakhir. Adapun detail yang dapat dilihat pada Gambar 1.4 di bawah ini.



Gambar 1. 6 Tabel Produksi Penelitian Mengenai Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Penelitian tentang implementasi kebijakan dalam konteks kebijakan penanggulangan kemiskinan dari waktu ke waktu berkembang cukup cepat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa topik ini telah mendapatkan perhatian besar oleh peneliti sebelumnya. Namun, belum terdapat penelitian yang komprehensif meneliti tentang struktur perkembangan pengetahuan terkait topik implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan pada periode kedua masa kepemimpinan Presiden Jokowi (2019-2024). Selain itu, masih minim kajian yang mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan (*critical success factors*) implemementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia secara sistematis. Topik yang dibawakan para peneliti sebelumnya masih bersifat terpisah, sektoral atau studi kasus daerah tertentu tanpa sintesis menyeluruh.

Berdasarkan permasalahan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, penelitian ini akan terkait dengan pentingnya mengkaji secara sistematis berbagai literatur untuk menemukan faktor-faktor keberhasilan (*critical success factors*) berdasarkan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi periode kedua Tahun 2019-2024. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis struktur perkembangan pengetahuan pada topik implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, serta merumuskan *critical success factors* yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat judul sebagai berikut: **“Critical Success Factors dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis dari Tahun 2019 Sampai 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka peneliti menyusun beberapa poin permasalahan yang dirancang dalam penelitian antara lain:

1. Bagaimana struktur perkembangan pengetahuan pada topik penelitian implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia?
2. Apa saja *critical success factors* yang memengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka peneliti merumuskan beberapa tujuan penelitian antara lain:

1. Memberikan wawasan pengetahuan yang lebih komprehensif dan lebih mendalam pada topik penelitian implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
2. Menganalisis *critical success factors* pada topik penelitian implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian adalah dampak dari pencapaian tujuan. Melalui uraian dan pembahasan yang diberikan dalam penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi banyak orang, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi ide gagasan dan pemikiran dalam pandangan ilmu administrasi publik terutama mengenai studi kebijakan publik di bidang sosial, yakni terkait implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dengan faktor penentu keberhasilan kebijakan tersebut. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan dengan topik yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, dan pengalaman bagi peneliti sendiri. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dan acuan untuk metode penelitian serta sebagai referensi untuk penelitian lain.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dengan faktor penentu keberhasilan kebijakan tersebut.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar masukan bagi pemerintah Indonesia dalam memberikan masukan terkait implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Suardini et al. (2025) meneliti tentang analisis kebijakan publik pengentasan kemiskinan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo Tahun 2014-2024. Penelitian ini menjelaskan terkait berbagai strategi melalui kebijakan-kebijakan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ditemukan bahwa pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, penurunan angka kemiskinan belum mencapai target. Dibutuhkan komitmen pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap analisis kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam memberikan sudut pandang terkait berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Akan tetapi, lebih berfokus pada periode

kedua kepemimpinan Presiden Jokowi dan menggunakan metode pengumpulan data yang sama, yakni studi pustaka.

Saribulan et al. (2023) meneliti tentang perkembangan penelitian penanggulangan kemiskinan di Indonesia rentang tahun 2003-2022 dengan menggunakan analisis bibliometrik dan analisis konten pada artikel *terpublish* yang terindeks dengan Scopus. Penelitian ini menjelaskan struktur perkembangan terkait topik tersebut melalui tren publikasi dan visualisasi perkembangan publikasi berdasarkan kata kunci penulis. Selain itu, memberikan penjelasan terkait berbagai upaya pemerintah dalam penanganan kemiskinan dan berpotensi menjadi topik penelitian di masa mendatang. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi peneliti, yakni memberikan gambaran awal dalam mengembangkan analisis konten dengan alat bantu *System Literature Review*. Namun, dalam penggunaan topik perkembangan struktur pengetahuan rentang tahun dan isu yang berbeda.

Penelitian oleh Tirtana et al. (2023) menganalisis tentang implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni atau bisa disebut Program RTLH di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor keberhasilan implementasi yang memberikan keoptimalan implementasi. Program terlaksana dengan cukup baik karena mampu memberikan dampak positif ke masyarakat kurang mampu, yakni mereka merasa terbantu dalam mendapatkan penghidupan yang layak terutama untuk tempat tinggal yang nyaman. Penelitian ini memberikan gambaran

bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berhasil adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Penelitian oleh Sasuwuk et al. (2021) menganalisis terkait pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada masa pandemi Covid-19, yakni dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sea Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan belum terlaksana secara optimal karena terdapat maladministrasi. Penghambat implementasi kebijakan tersebut merupakan analisis berdasarkan variabel implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Melalui teori Van Meter dan Van Horn dapat memberikan gambaran bagi peneliti sebagai rujukan pada faktor-faktor yang telah diuji sebelumnya dengan hasil temuan dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Melalui teori ini, dapat membantu peneliti dalam menganalisis *critical success factors* secara lebih terarah.

Penelitian oleh Devi et al. (2025) mengkaji tentang implementasi Program Keluarga Harapan atau biasa disebut PKH sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan di Desa Sumberlele, Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi program dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat berdasarkan empat variabel dari teori keberhasilan suatu kebijakan menurut George C Edward III. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi peneliti bahwa variabel-variabel implementasi kebijakan tersebut bisa menjadi perbandingan nantinya dalam penemuan *critical success factors*. Selain itu, memberikan gambaran terkait

teori lain yang berhubungan terhadap analisis implementasi kebijakan publik terkhususnya kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Dalam penelitian terdahulu, membahas terkait perkembangan berbagai kebijakan sebagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan dan memberikan sudut pandang terkait indikator penentu atau elemen yang memengaruhi keberhasilan implementasi. Topik yang dibawa para peneliti sebelumnya masih bersifat terpisah, sektoral atau studi kasus daerah tertentu tanpa sintesis menyeluruh. Terdapat kekosongan dalam konteks yang menyebabkan kebutuhan akan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah diterapkan di Indonesia terutama terkait struktur perkembangan pengetahuan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan pada periode kedua masa kepemimpinan Presiden Jokowi (2019-2024). Selain itu, merumuskan faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Melalui penelitian ini dapat mengisi kesenjangan dengan mengembangkan kontribusi baru dalam memahami fenomena yang dikaji. Penelitian ini menggunakan proses *System Literature Review* untuk membantu dalam menganalisis temuan sebelumnya terkait struktur perkembangan dan mengidentifikasi pola penelitian lebih mendalam sebagai upaya dalam mengisi kekosongan (*research gap*).

1.5.2 Kebijakan Sosial

Salah satu bentuk kebijakan publik adalah kebijakan sosial yang mengatur urusan kesejahteraan sosial. Kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk merespon isu-isu yang bersifat publik

seperti mengatasi permasalahan sosial maupun memenuhi kebutuhan masyarakat banyak (Suharto, 2011). Bentuk kebijakan sosial ini sesuai dengan tipe kebijakan berdasarkan pendapat dari Agustino (2020), yakni tipe kebijakan substansial dan kebijakan prosedural yang berfokus pada kegiatan pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah dasar seperti kesehatan, pendidikan, pemberian subsidi bagi masyarakat miskin, pembangunan jalan. Kebijakan sosial juga berdasarkan tipe kebijakan yang distributif, redistributif, regulatif, dan *self-regulatory* berdasarkan dampak sosial dan hubungannya dengan pembuatan kebijakan. Kebijakan ini merupakan bentuk tindakan pemerintah untuk mendistribusikan layanan kepada individu, kelompok, masyarakat yang rentan, seperti pemberian beras untuk masyarakat miskin, kartu sehat, dan bantuan langsung tunai.

Kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan, kerangka kerja, petunjuk, rencana, peta atau strategi yang dirancang untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah ke dalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial sering diidentikkan dengan kebijakan publik karena urusan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan orang banyak (Suharto, 2017). Kebijakan sosial umumnya menjadi tanggung jawab pemerintah karena dibiayai dari pajak yang dihimpun dari masyarakat. Kebijakan sosial difokuskan pada pelayanan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebijakan sosial merupakan kebijakan yang berfokus pada kata “sosial”, yakni mencakup berbagai hal yang berkaitan

dengan bidang-bidang kemasyarakatan seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, serta makanan sebagai kebutuhan primer dan sekunder. Spicker (dalam Suharto, 2017) menyajikan tiga kriteria atau standar yang mendefinisikan kebijakan sosial, yakni sebagai berikut:

1. *Social policy is about policy.* Kebijakan sosial adalah memiliki fokus dan urusannya sendiri, yakni menyangkut kebijakan, meskipun bersentuhan dengan bidang makanan, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan sosial tidak langsung berhubungan dengan perkembangan anak, tetapi mendukungnya melalui pendidikan dan pelayanan sosial untuk mengatasi berbagai kesulitan. Kebijakan sosial juga tidak langsung menangani kesehatan fisik, tetapi berperan dalam mempromosikan kesehatan dan menyediakan jaminan serta perawatan kesehatan.
2. *Social policy is concerned with issues that are social.* Sosial yang dimaksud tidak berarti luas, akan tetapi berfokus pada berbagai respon kolektif yang dibuat untuk mengatasi masalah sosial yang dirasakan oleh publik.
3. *Social policy is about welfare.* Kebijakan sosial berkaitan dengan kesejahteraan sosial, yakni terkait penyediaan layanan sosial oleh negara. Kesejahteraan sosial yang memberikan jenis manfaat tertentu khususnya jaminan sosial berbasis kemampuan yang diperuntukan bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan karakteristik substansi kebijakan sosial menurut Spicker, kemiskinan dapat dikategorikan sebagai kebijakan sosial. Dalam konteks kebijakan sosial, kemiskinan tidak secara langsung terkait dengan perkembangan kemiskinan, sebaliknya terkait dengan faktor-faktor penyebab kemiskinan, seperti kesehatan, pendidikan serta pelayanan sosial. Sebagai kebijakan sosial, kemiskinan merupakan masalah sosial yang dirasakan oleh publik sehingga dibutuhkan pembuatan respon kolektif untuk mengatasinya. Kebijakan penanganan kemiskinan merupakan kebijakan sosial untuk kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan berbagai program layanan sosial. Selain itu penanganan kemiskinan merupakan kebijakan yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang juga memberikan jaminan sosial bagi masyarakat miskin.

Kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang berfungsi untuk mengarahkan, menterjemahkan, dan mencapai tujuan pembangunan sosial. Menurut Suharto (2017) tujuan kebijakan sosial adalah untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan sosial adalah kedua hal yang berbeda. Pemecahan masalah sosial berarti melakukan perbaikan ketika situasi yang tidak diharapkan mengganggu dan merusak tatanan masyarakat. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan berarti menyediakan pelayanan sosial yang diperlukan untuk mencegah masalah muncul, terulang, atau menyebar lebih luas.

Untuk memiliki kebijakan anti kemiskinan yang efektif, setiap kebijakan memerlukan penjabaran yang lebih. Desain program penanggulangan kemiskinan yang efektif harus memenuhi berbagai kriteria menurut (Dasgupta, 2003) antara lain sebagai berikut: 1) Spesifik, program harus disesuaikan dengan institusi lokal karena tidak semua program cocok untuk segala situasi; 2) Relevan dengan permasalahan; 3) Didasari pada kesadaran bahwa kemiskinan adalah suatu akibat dari situasi lain, bukan satu-satunya faktor; 4) Memahami konsekuensi yang tidak diinginkan; dan 5) Bergantung pada sumber daya lokal.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada RPJP, sedangkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada RPJPD. Adapun strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan, yakni dilakukan dengan:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

1.5.3 Kemiskinan

1.5.3.1 Konsep Kemiskinan

Konsep kemiskinan bersifat multidimensional ini lebih tepat untuk digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan dan merumuskan

kebijakan penanganan kemiskinan di Indonesia. Konsep kemiskinan memiliki keterkaitan dengan perspektif pekerjaan sosial yang fokus terhadap konsep keberfungsian sosial dan memandang manusia dalam konteks lingkungan dan situasi sosialnya (Suharto, 2017). Standar tingkat hidup yang rendah dengan adanya kekurangan materi pada sekelompok orang dibandingkan standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakat, dapat didefinisikan sebagai kemiskinan (Djaenal et al., 2021), sedangkan definisi kemiskinan menurut Wulandari et al. (2022) kondisi di mana seseorang tidak dapat mencapai taraf hidup masyarakat dan tidak mampu memaksimalkan baik mental, tenaga maupun fisik disebut kemiskinan. Melalui konsep ini, kemiskinan dapat diukur menggunakan nilai garis kemiskinan (*poverty line*), yakni dengan mengidentifikasi ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Kemiskinan berkaitan erat dengan ekonomi, yakni sebuah bentuk pendapatan dalam uang maupun keuntungan non-material lainnya adalah penentu individu dalam menjalani kehidupannya berdasarkan taraf hidup yang telah ditentukan.

Ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk hidup yang lebih baik disebut sebagai kemiskinan (BPS, 2024). Kebutuhan dasar yang dimaksud dalam definisi adalah kebutuhan akan makanan, rumah, pakaian, pendidikan, kesehatan dan perawatan. Dapat dikatakan bahwa individu menjadi miskin akibat adanya faktor-faktor penghambat yang menghalangi individu dalam

memaksimalkan peluang yang didapat di masyarakat. Kemiskinan ini disebut sebagai kemiskinan struktural, yakni kemiskinan yang diakibatkan karena sistem dan struktur sosial tidak dapat memberikan kesempatan kerja kepada orang miskin (Suharto, 2017).

Standar kemiskinan di Indonesia ditetapkan berdasarkan definisi dari Badan Pusat Statistik, yakni bahwa kemiskinan adalah kondisi kurang sejahtera yang dihitung dalam Rupiah per kapita per bulan. BPS menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur suatu kemiskinan. Melalui pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Oleh karena itu, individu dengan rata-rata pengeluaran perkapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan disebut sebagai penduduk miskin (BPS, 2024). Sementara itu, *World Bank* menetapkan ukuran kemiskinan berdasarkan berapa kalori yang harus dibutuhkan per orang/hari, yakni 2200 kalori, jika kurang dari itu maka termasuk miskin.

Secara sederhana kemiskinan merupakan suatu kondisi ketika seorang individu tidak mempunyai kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan taraf hidup yang berlaku di masyarakat. Individu yang berada di kondisi miskin tidak mampu memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat sehingga mereka

cenderung tidak memiliki pekerjaan yang lebih baik. Pendapatan rendah yang menimbulkan kekurangan materi menimbulkan kondisi yang kurang sejahtera. Kemiskinan akan terus ada jika seorang individu tidak menggunakan aksesnya dalam mendapatkan pekerjaan layak serta memanfaatkan segala kesempatan yang ada untuk menunjang kehidupannya.

1.5.3.2 Ciri-Ciri kemiskinan

Berdasarkan studi SMERU, Suharto (2017) menunjukkan sembilan ciri-ciri yang menandai kemiskinan, yakni sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan).
2. Ketidaksediaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya, yakni kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi.
3. Tiada jaminan masa depan karena tidak ada investasi untuk pendidikan dan keluarga.
4. Rentan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Akses mendapatkan lapangan pekerjaan dan mata pencaharian terbatas.

8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

1.5.3.3 Bentuk Program Penanganan Kemiskinan

Kemiskinan dan pekerjaan sosial memiliki keterkaitan, yakni keterlibatan dalam penanggulangan kemiskinan. Pekerjaan sosial merupakan pekerjaan yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat untuk menjalani kehidupan mereka sesuai dengan perannya (Suharto, 2017). Strategi penanganan kemiskinan pekerjaan sosial berpusat pada meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk melakukan hal-hal dalam menjalani kehidupan sesuai dengan status mereka. Terdapat dua pendekatan pekerjaan sosial untuk menentukan program anti kemiskinan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin (Suharto, 2017). Pendekatan pertama adalah kemiskinan dilihat dari penyebab dan sumber kemiskinan yang terkait dengan lingkungan, seperti pertemanan, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan ini menggunakan penanganan kemiskinan yang bersifat kelembagaan. Pendekatan kedua adalah kemiskinan dilihat si miskin dari konteks situasinya, yakni strategi yang digunakan berpijak pada prinsip *individualisation* dan *self-determinism* yang melihat si miskin secara individual yang memiliki masalah dan kemampuan unik.

Berdasarkan kedua pendekatan tersebut maka terdapat bentuk program penanganan kemiskinan, yaitu antara lain:

1. Pemberian bantuan sosial dan rehabilitasi sosial.
2. Program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial.
3. Program pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberian modal usaha, pelatihan usaha ekonomi produktif, pembentukan pasar sosial dan koperasi, pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, serta pembinaan anak dan remaja.
4. Program kedaruratan, yakni bantuan uang, barang, dan tenaga bagi korban bencana alam.
5. Program “penanganan bagian yang hilang”, yakni yang terdiri dari program yang dianggap akan memutuskan rantai kemiskinan melalui penanganan salah satu aspek kunci kemiskinan yang jika “disentuh” akan membawa dampak terhadap aspek lainnya. Misalnya, pemberian kredit, pembentukan kelompok usaha bersama, bantuan stimulan untuk usaha ekonomis produktif skala mikro (Suharto, 2017).

1.5.4 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah cara agar kebijakan mencapai tujuannya, tidak ada yang kurang atau lebih. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan dua cara, yakni secara langsung

dalam bentuk program atau melalui pembuatan kebijakan turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2009). Menurut Daniel Mazmanan dan Paul A. Sabatier (dalam Nugroho, 2009) bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan ketetapan kebijakan dasar, biasanya dimasukkan dalam undang-undang atau dalam berbentuk perintah eksekutif penting atau ketetapan pengadilan. Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan implementasi kebijakan adalah proses penerapan atau pelaksanaan keputusan kebijakan dasar dengan tujuan pencapaian hasil yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan akan selalu dihadapkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat, kedua faktor tersebut nantinya akan menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Grindle menyatakan bahwa keberhasilan mengimplementasikan suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan ke dalam dua kelompok fenomena. Dua kelompok fenomena yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, yaitu faktor isi kebijakan (*content of policy*) dan kontek kebijakan (*context of policy*). Keberhasilan implementasi menurut Grindle (2017) tergantung pada isi kebijakan (*content of policy*) yang terdiri dari 6 variabel, yakni sebagai berikut: 1. Kepentingan yang dipengaruhi; 2. Tipe manfaat; 3. Derajat perubahan yang diharapkan; 4. Letak pengambilan keputusan; 5. Pelaksanaan program; dan 6. Sumber daya yang dilibatkan. Selain isi kebijakan (*content of policy*), kontek kebijakan (*context of policy*) juga memiliki pengaruh yang besar, terdiri dari 3 variabel, yakni sebagai

berikut: 1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; 2. Karakteristik lembaga & penguasa; dan 3. Kepatuhan & daya tanggap.

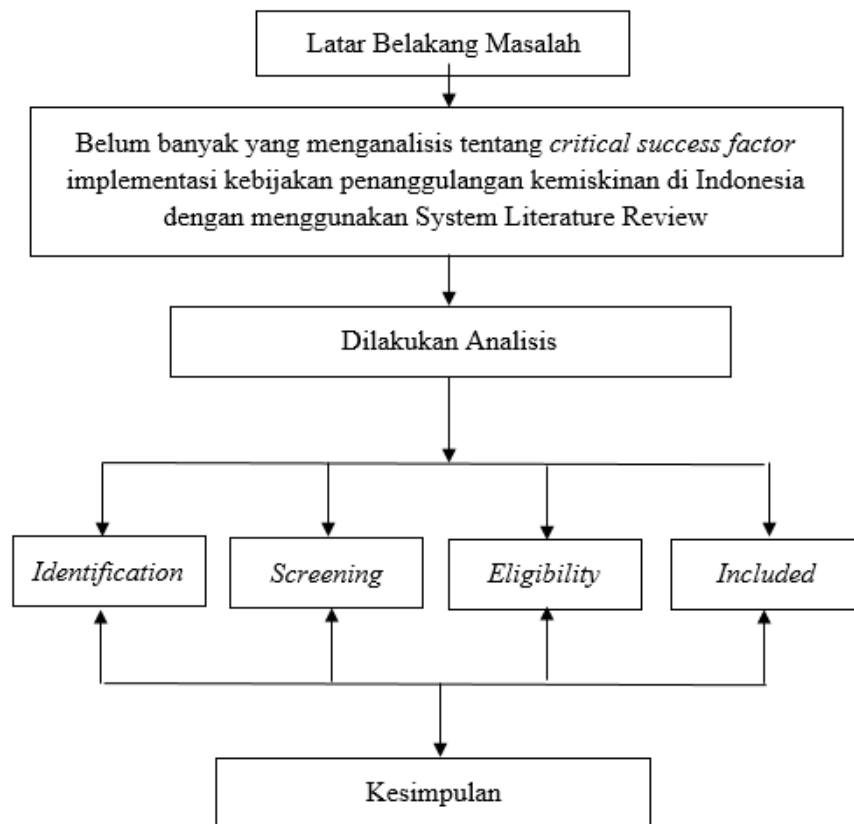
Model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (2017) menyarankan untuk memerhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif ada empat variabel, yaitu komunikasi, struktur organisasi, sumber daya, dan disposisi yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik. Struktur organisasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung. Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk mampu melaksanakan kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2009).

Model implementasi yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Adapun variabel yang memengaruhi hasil implementasi kebijakan, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumberdaya, (3) komunikasi dan penggunaan paksaan, (4) disposisi implementor, (5) karakter lembaga pelaksana, dan (6) kondisi sosial, ekonomi dan politik. Tujuan atau sasaran dan standar kebijakan merupakan sangat penting untuk proses implementasi. Tujuan dan standar kebijakan tidak jelas membuat implementor sulit memahaminya dan menghasilkan berbagai

sikap dari pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Pada akhirnya, ini mengurangi kelancaran dan keberhasilan implementasi kebijakan (Suparno, 2017).

Teori-teori implementasi kebijakan ini akan mengantarkan peneliti dalam menganalisis faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya teori memungkinkan untuk menghubungkan temuan dari literatur dengan konsep yang lebih luas. Melalui indikator yang ada dalam teori-teori implementasi kebijakan tersebut dapat membantu peneliti dalam menganalisis hasil tinjauan literatur, yakni temuan faktor-faktor keberhasilan, hal tersebut mampu membantu dalam mengamati berbagai kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo Periode Kedua Tahun 2019-2024 sehingga mampu menangkap perubahan-perubahan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di Indonesia.

1.6 Kerangka Penelitian



Gambar 1. 7 Kerangka Penelitian

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Dalam menganalisis kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia ditemukan beberapa faktor bahwa Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki permasalahan kemiskinan. Hal tersebut dibuktikan dengan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin menunjukkan pola fluktuatif. Kemiskinan sudah ada sejak era kemerdekaan dan saat krisis ekonomi 1988 mendorong lonjakan angka kemiskinan. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan terutama sejak masa reformasi. Dinamika politik memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan periode pertama di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo

mengalami *divided government* hingga akhirnya pada periode kedua berhasil membentuk *unified government* dan membuka peluang konsolidasi kebijakan lebih efektif. Kemiskinan juga merupakan isu strategis pembangunan yang didukung dengan munculnya UUD RI 1945 Pasal 34 Ayat (1), menjadi isu strategis di RPJMN 2020-2024. Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia gagal karena pelaksanaan kebijakan di lapangan yang kurang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Penelitian ini berupaya menganalisis dengan fokus pada aspek struktur perkembangan pengetahuan dan *critical success factor* kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan metode *System Literature Review* (SLR). Penggunaan SLR dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang topik penelitian pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dapat memberikan temuan yang akurat dan relevan dengan penelitian. Pemilihan metode SLR ini akan dianalisis dengan bantuan pedoman PRISMA melalui empat tahapan meliputi *Identification*, yakni mengidentifikasi penelitian relevan dan menentukan sumber data. *Screening*, menyaring artikel yang telah dikumpulkan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. *Eligibility*, memilih paper yang akan dianalisis lebih dalam. *Included*, tahapan akhir yang menghasilkan paper final yang telah melalui setiap tahapan. Data yang telah dianalisis akan diekstraksi dan visualisasi menggunakan bantuan Microsoft Excel, kemudian akan menghasilkan informasi untuk menunjukkan pola

dan kecenderungan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

1.7 Operasional Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan suatu keadaan yang menunjukkan atau menjelaskan pembatasan konsep yang diamati atau diteliti. Definisi konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Critical Success Factors

Critical success factors merupakan faktor-faktor penting yang harus ada atau dicapai agar suatu organisasi, strategi, program sukses mencapai tujuannya. *Critical success factors* mencakup beberapa aspek penentu keberhasilan yang harus diprioritaskan dan dikelola dengan baik untuk menjamin hasil yang optimal.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses menerjemahkan keputusan kebijakan yang telah dirumuskan menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan terdiri dari berbagai rangkaian, yakni dengan adanya perencanaan operasional, pelaksanaan program, maupun evaluasi hasil dan dampaknya terhadap sasaran kebijakan.

3. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan serangkaian strategi, program, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di suatu wilayah atau

kelompok masyarakat. Kebijakan ini biasanya mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Metode yang dipilih untuk mengumpulkan data berkualitas tinggi dari berbagai sumber dengan *System Literature Review* (SLR) dengan teknik analisis isi yang terbatas pada faktor-faktor kunci pada implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *System Literature Review* dalam pendekatan kualitatif adalah mensintesis hasil-hasil penelitian yang telah terseleksi dan bersifat deskriptif dengan tingkat pemahaman yang lebih komprehensif dan menyeluruh (Perry & Hammond, 2002). Temuan hasil penelitian yang telah terseleksi dapat menghasilkan pengetahuan baru yang terbatas pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang efektif untuk menggambarkan memahami fenomena secara mendalam.

1.8.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian SLR ini, peneliti mendapatkan sumber-sumber data melalui data sekunder. Data yang diberikan secara tidak langsung kepada

peneliti dikenal sebagai data sekunder dan digunakan untuk mendukung penelitian. Data sekunder berasal dari artikel jurnal akademik yang berasal dari *database* elektronik *Google Scholar* dari tahun 2019-2024. Melalui *database* elektronik *Google Scholar* ini dapat mengakses berbagai artikel jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dari tahun 2019-2024. Data sekunder yang akan dianalisis dalam akan memberikan pola atau sktruktur penelitian terkait pelaksanaan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dari tahun 2019-2024 dari temuan literatur.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi literatur sebagai teknik untuk mengumpulkan data. Studi literatur adalah mempelajari, mengkaji, dan menelaah literatur berupa buku, jurnal maupun dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian (Fauziah et al., 2020). Studi literatur disebut juga sebagai studi kepustakaan, kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa sumber pustaka yang digunakan adalah artikel dari jurnal di *database* elektronik, yakni *Google Scholar*. Sumber studi literatur diambil sebagai data penelitian dengan strategi pencarian literatur.

1.8.4 Teknik Analisis

Metode *System Literature Review* (SLR) merupakan teknik analisis dalam penelitian ini, yakni dengan pengidentifikasian, evaluasi, dan menganalisis penelitian yang dipublikasikan mengenai pelaksanaan kebijakan

penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *System Literature Review* atau sering disebut sebagai tinjauan pustaka sistematis adalah suatu sarana mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi keseluruhan temuan penelitian yang relevan dengan topik penelitian, pertanyaan penelitian atau fenomena penelitian (Kitchenham & Charters, 2007). Analisis ini terbatas pada faktor penentu keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

SLR dipilih sebagai langkah untuk mengumpulkan data berkualitas tinggi dari berbagai sumber. Penelitian ini berupaya untuk menempatkan semua artikel mengenai subjek tertentu untuk memberikan ringkasan literatur relevan yang seimbang dan akurat. Menggunakan jenis penelitian ini dapat mengungkap pola dan struktur penelitian yang ada dengan mengidentifikasi adanya kesenjangan yang dapat diisi oleh penelitian di masa depan. Dalam metode SLR ini memungkinkan terhindar dari bias penelitiannya dan pemahaman yang bersifat subjektif saat proses *literature review*. SLR juga dapat memberikan informasi tentang dampak suatu fenomena dalam berbagai situasi (Kitchenham & Charters, 2007).

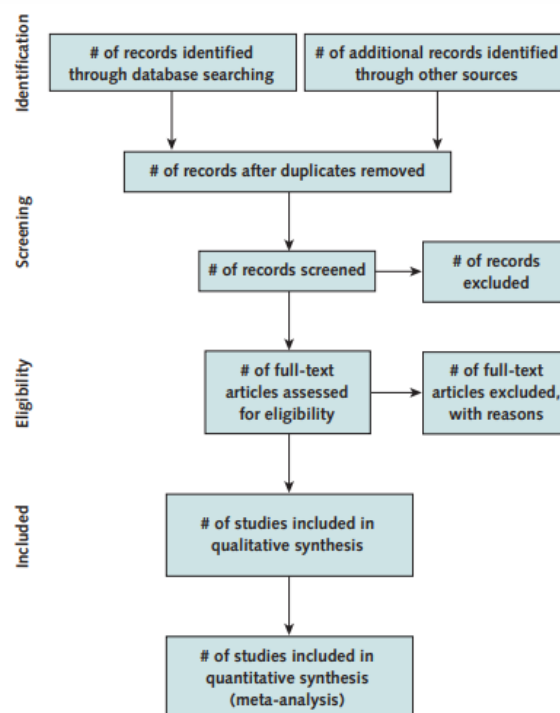
Penggunaan metode SLR untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan dapat menganalisis pola atau tren yang dapat digunakan untuk membantu peneliti lain pada penelitian topik serupa. Adapun metode penelitian ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan penelitian lainnya, yakni: sebagai berikut: 1) Pendefinisian protokol tinjauan yang merinci pertanyaan penelitian dan metode yang akan digunakan untuk melakukan tinjauan; 2) Berdasarkan

pada strategi pencarian yang ditetapkan dengan tujuan untuk mendeteksi sebanyak mungkin literatur yang relevan; 3) Strategi pencarian yang didokumentasikan sehingga dapat dinilai ketelitian dan kelengkapan serta keterulangan prosesnya; 4) Pencantuman kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas untuk menilai setiap studi utama yang potensial; dan 5) Menentukan informasi yang akan diperoleh berdasarkan kriteria kualitas yang digunakan untuk mengevaluasi setiap studi utama (Kitchenham & Charters, 2007).

Tinjauan sistematis melibatkan beberapa aktivitas terpisah dengan berbagai tahapan dan mekanisme penelitian. Tahapan dalam *System Literature Review* terdiri dari tiga fase utama: 1) *Planning*, yakni peneliti menemukan bahwa tinjauan diperlukan, membuat pertanyaan penelitian dan membuat protokol penelitian untuk mengatur pelaksanaan tinjauan dan mengurangi kemungkinan bias peneliti; 2) *Conducting*, yakni peneliti mengidentifikasi dan memilih studi utama, penentuan strategi pencarian, proses seleksi studi dengan kriteria inklusi dan eksklusi, penilaian kualitas, mengekstrak, menganalisis, dan mensintesis data; dan 3) *Reporting*, yakni peneliti menulis laporan untuk menyebarkan hasil temuan tinjauan literatur (Xiao & Watson, 2019).

PRISMA (*The Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses*) adalah pedoman untuk melakukan proses SLR, seperti yang dilakukan oleh (Liberati et al., 2009). PRISMA merupakan seperangkat pedoman berdasarkan bukti untuk meninjau secara sistematis dan meta analisis. PRISMA memiliki protokol/tahapan yang bisa digambarkan dengan *flow diagram* yang terdapat empat tahapan dalam meninjau literatur, yaitu

identification, *screening*, *eligibility*, dan *included*. Tahapan *identification*, yakni dengan mengidentifikasi penelitian yang relevan, pemilihan *database*, dan penggunaan *keyword* untuk pencarian literatur. Selanjutnya tahap *screening*, yaitu dengan *screening* dari artikel yang telah dikumpulkan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Pada tahap *eligibility* merupakan tahap memilih *papers* lebih dalam untuk dianalisis. *Included*, yakni merupakan hasil final dari *papers* yang telah melalui setiap tahapan.



Gambar 1. 8 PRISMA Flow Diagram

Sumber: (Liberati et al., 2009)

1.8.4.1 Strategi Pencarian Literatur

Strategi pencarian literatur melewati beberapa proses, yakni proses *identification*, literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji secara kolektif menggunakan *database*

elektronik dari *Google Scholar*. *Google Scholar* dipilih karena memuat informasi terkait jurnal ilmiah, publikasi ilmiah, buku, peristiwa serta objek lainnya. Pemilihan *Google Scholar* didasarkan pada reputasinya yang terkenal dan sangat selektif, dengan kebijakan pemilihan dokumen yang ketat dan dikelola oleh *reviewer* independen dengan memastikan indeks kualitas tertinggi.

Untuk mempermudah dalam pencarian literatur dalam *database* elektronik, peneliti menentukan kata kunci pencarian (*keyword*). Kata kunci yang digunakan untuk pencarian berasal dari pertanyaan penelitian untuk mempermudah peneliti membedah pertanyaan penelitian ke dalam domain konsep. Pengambilan konsep-konsep dalam pernyataan pencarian diperluas dengan sinonim, singkatan, ejaan alternatif, dan istilah-istilah terkait (Kitchenham & Charters, 2007). Cara untuk membangun *string* pencarian adalah dengan menggunakan prinsip *Boolean* “AND” dan “OR” (Xiao & Watson, 2019). Dalam penyertaan *string* pencarian menggunakan kombinasi kata “OR” untuk dua konsep yang sama, sedangkan “AND” untuk dua konsep yang berbeda. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia karena cakupan yang luas untuk membantu dalam menemukan artikel yang berkualitas dan terindeks. *Scope* penelitian ini mencakup lingkup nasional sehingga penggunaan bahasa Indonesia dipilih untuk mendukung dalam

pencarian literatur. Dalam penelitian ini penulis menentukan kata kunci pencarian berdasarkan pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

Request Question 1 : Bagaimana struktur perkembangan pengetahuan pada topik penelitian pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia?

Request Question 2 : Apa saja *critical success factors* yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia?

Tabel 1. 1 Search Strings Penelitian

Konsep	Kata Kunci-Sinonim	Kode	Rangkaian Kata Kunci
faktor keberhasilan	-	“faktor keberhasilan”	“faktor keberhasilan” AND “implementasi kebijakan” OR “implementasi program” AND “penanggulangan kemiskinan” OR “pengentasan kemiskinan” AND “Indonesia”
implementasi kebijakan	implementasi program	“implementasi kebijakan” OR “implementasi program”	
penanggulan gan kemiskinan	pengentasan kemiskinan	“penanggulang an kemiskinan” OR “pengentasan kemiskinan”	
Indonesia	-	“Indonesia”	

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Rangkaian kata kunci ini akan digunakan dalam pencarian literatur *database* elektronik, yaitu *Google Scholar*. Tahapan ini menghasilkan penemuan 256 publikasi ilmiah yang menyinggung kata kunci yang ditetapkan dari penelitian sejak 2001 – 2025. Pencarian saat ini masih belum selesai karena bersifat data mentah, untuk selanjutnya

untuk menemukan artikel yang sesuai dengan tujuan penelitian dan membahas pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara mendalam, yakni dengan melakukan skrining dengan penetapan kriteria inklusi dan eksklusi.

1.8.4.2 Penentuan Inklusi dan Eksklusi

Setelah mencari dan mengumpulkan daftar referensi, peneliti memeriksa setiap artikel untuk memastikan apakah layak dianalisis. Cara yang efisien adalah dengan mengikuti prosedur dua tahap: pertama dimulai dengan menyaring artikel secara kasar untuk dimasukkan berdasarkan tinjauan abstrak, yang kedua diikuti dengan penilaian kualitas yang disempurnakan berdasarkan tinjauan teks lengkap. Tujuan dari penyaringan awal ini adalah untuk menyaring artikel dengan konten yang tidak dapat diterapkan pada pertanyaan penelitian dan kriteria yang ditetapkan (Xiao & Watson, 2019). Peneliti menetapkan kriteria yang mampu mengklasifikasikan penelitian, dapat diinterpretasikan secara andal, dan dapat menghasilkan jumlah literatur yang dapat dikelola untuk dikaji (Kitchenham & Charters, 2007).

Penentuan kriteria inklusi dan eksklusi menggunakan kriteria kelayakan yang memiliki dua komponen, yaitu karakteristik studi dan karakteristik laporan (Liberati et al., 2009). Karakteristik studi mencakup *population*, *intervention*, *comparasion*, *outcome*, dan *study design* (PICOS). Pendekatan PICOS merupakan pengembangan dari PICO dengan penambahan unsur Studi Desain (S) untuk membantu

membatasi artikel yang tidak relevan dan lebih spesifik (Methley et al., 2014). Dalam konteks penelitian ini, penggunaan PICOS membantu dalam penyaringan literatur yang lebih terfokus. Meskipun pendekatan PICOS meningkatkan sensitivitas pencarian secara keseluruhan, tingkat spesifisitasnya terhadap topik penelitian masih dapat terbatas sehingga tetap memerlukan penyesuaian dalam proses seleksi literatur (Methley et al., 2014).

Penjelasan tiap elemen dalam pendekatan PICOS, yakni 1) *Population*, populasi yang akan menganalisis masalah dan diperlukan definisi yang tepat dari sekelompok partisipan; 2) *Intervention*, tindakan intervensi yang dipertimbangkan dalam tinjauan sistematis dilaporkan secara transparan; 3) *Comparasion*, pelaporan intervensi kelompok sebagai pembanding (kontrol) yang jelas; 4) *Outcome*, suatu hasil penelitian untuk menafsirkan validitas dan generalisasi hasil tinjauan sistematis; dan 5) *Study design*, pendekatan penelitian yang digunakan untuk direview. Adapun karakteristik laporan mencakup tahun yang dipertimbangkan, bahasa publikasi, dan status publikasi. Berikut kriteria inklusi dan eksklusi yang digunakan oleh peneliti:

Tabel 1. 2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
<i>Population</i>	Masyarakat miskin di Indonesia yang menjadi target kebijakan penanggulangan kemiskinan	Bukan kategori masyarakat miskin di Indonesia yang menjadi target kebijakan penanggulangan kemiskinan

<i>Intervention</i>	Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia	Selain kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia
<i>Comparasion</i>	Tidak ada faktor perbandingan	Tidak ada faktor perbandingan
<i>Outcome</i>	Faktor- faktor penentu keberhasilan yang memengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia	Selain faktor- faktor penentu keberhasilan yang memengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia
<i>Study design</i>	Artikel dari jurnal dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif	Selain artikel dari jurnal dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif
Tahun Publikasi	Tahun 2019 – 2024	Selain tahun 2019 – 2024
Bahasa	Bahasa Indonesia	Selain Bahasa Indonesia
Sumber Publikasi	Artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah berbasis OJS	Artikel dari jurnal yang tidak melalui proses review sesuai standarisasi OJS

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Pencarian dengan penggunaan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelumnya menghasilkan temuan 22 artikel yang selanjutnya akan diskriminasi kembali relevansinya dengan tujuan penelitian. Setelah melakukan proses penyaringan, diperlukan teks penelitian lengkap untuk tahap penilaian kualitas atau *Quality Assessment*. Penilaian kualitas adalah langkah terakhir dalam mempersiapkan kumpulan studi untuk ekstraksi dan sintesis data. Hal ini bermanfaat sebagai penyaring artikel dengan teks lengkap (Xiao & Watson, 2019). Prosedur penilaian kualitas peneliti akan membaca keseluruhan teks untuk memeriksa secara cermat. Tinjauan teks lengkap juga memberikan peluang untuk pemeriksaan akhir pada

penyertaan atau pengecualian. Artikel yang akan diskriminasi secara *Quality Assessment* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. 3 *Quality Assessment* Kriteria Artikel

<i>Quality Assessment</i>	Keterangan
<i>Quality Assessment 1</i>	Apakah artikel tersebut membahas tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia?
<i>Quality Assessment 2</i>	Apakah artikel tersebut membahas terkait faktor keberhasilan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan?

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Di bawah ini adalah hasil nilai jawaban untuk setiap pertanyaan yang diberikan kepada masing-masing artikel berdasarkan dua kriteria *Quality Assessment*.

Y (Ya) : Untuk artikel yang lolos dengan dua kriteria di atas.

T (Tidak) : Untuk artikel yang tidak lolos dengan dua kriteria di atas.

Berikut merupakan hasil dari penilaian kelayakan artikel berdasarkan kriteria *Quality Assessment*.

Tabel 1. 4 Penilaian Artikel Sesuai dengan *Quality Assessment*

No	Judul	Penulis	Tahun	QA1	QA2	Hasil
1	Analisis Faktor Keberhasilan Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene	Muhammad Sajidin dan Saddam Husain Tamrin	2023	Y	Y	Lolos
2	Analisis Keberhasilan	Ardyan Rakhma	2021	Y	Y	Lolos

	Implementasi Program Pertanian Perkotaan di Kelurahan Lakarsantri Kota Surabaya	d Pradana, Wahyu Nurharjamo				
3	Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang	Nisra, Andi Uceng, Sapri, Syahrir L	2021	Y	Y	Lolos
4	Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kota Batam	Duwi Susilawati, Etika Khairina	2023	Y	Y	Lolos
5	Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Cibiruy Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022	Rizky Gumela, Elisa Susanti, Mas Dadang Enjat Munajat	2024	Y	Y	Lolos
6	Implementasi Program Keluarga Harapan Kecamatan Cisitua Kabupaten Sumedang	Rika Kusdinar dan Dewi Inggit Pergiwa	2021	Y	Y	Lolos
7	Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo	Debby Ariyanto, Sastro M. Wantu, Yanti Aneta	2021	Y	Y	Lolos
8	Implementasi Kebijakan Pembangunan Industri Rumah Tangga Melalui Pemberdayaan	Esti Hartati, Nurliah Nurdin, Firman	2024	Y	Y	Lolos

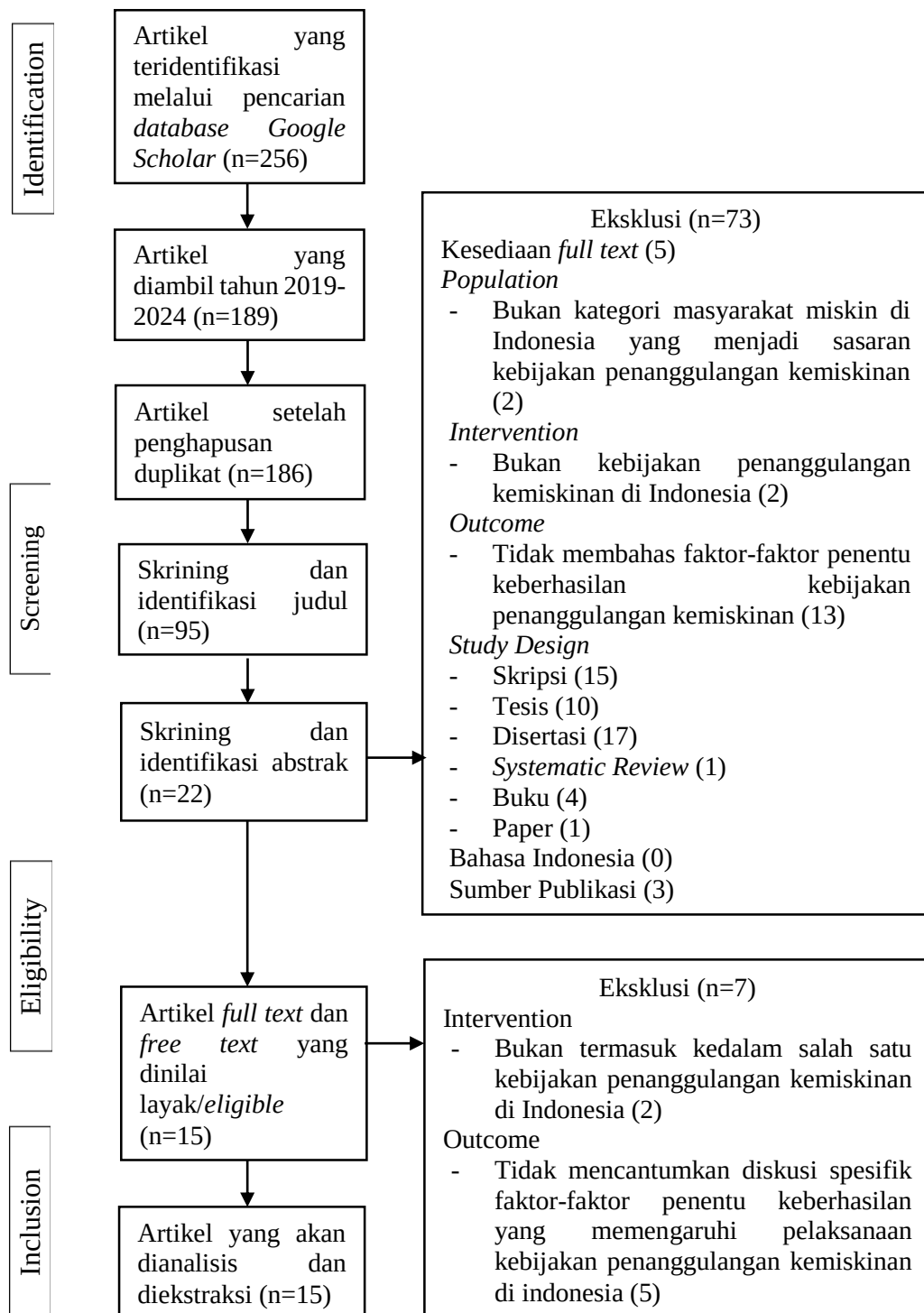
	Perempuan di Kabupaten Kulon Progo	Hadi Rivai				
9	Faktor Keberhasilan Program Kelompok Usaha Bersama	Melly Fitria dan Mochamad Fachruruzi	2023	Y	Y	Lolos
10	Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Dumai Kota	Lili Suryani	2023	Y	Y	Lolos
11	Implementasi Kebijakan Penurunan Kasus Stunting di Kota Samarinda	Achmad Furqan Septianto, Dyah Lituhayu, Endang Larasati Setianingsih	2024	Y	Y	Lolos
12	Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di DKI Jakarta	Roy Morado	2021	Y	Y	Lolos
13	Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan di Kelurahan Tewaan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung	Stevie M. Mangalo, Evi E. Masengi, Fitri H. Mamonto	2024	Y	Y	Lolos
14	Tantangan Kebijakan Pembangunan Pertanian Dalam Masyarakat Subsisten: Analisis Kebijakan Revolusi Pertanian Kabupaten Sumba	Damar Waskitojati, Kameo Daniel, Paramardi G. Wiloso	2019	Y	Y	Lolos

	Barat Daya (SBD), NTT					
15	Dampak Program Rumah Gemilang Indonesia Oleh Laz Al-Azhar Jawa Timur Dalam Mengurangi Jumlah Pengangguran Di Kota Surabaya	Rizaldi Firmansyah, Rachma Indrarini	2022	Y	T	Tidak Lolos
16	<i>Communication Analysis Of The Implementation The Cash Direct Assistance (Blt) Program For The Impact Of Covid-19</i>	Isyah Zabibah, Hendra Sukmana	2022	Y	T	Tidak Lolos
17	Implementasi Inovasi Kebijakan Program (SPP) Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo	Resky Amalia. P, Andi Agustang, Andi Muhammad Idhan, Suryadi Lambali	2021	Y	Y	Lolos
18	Dinamika Kredit Program dan Perspektif Skema Baru Kredit Usaha Rakyat untuk Pembiayaan Pertanian 2020-2024	Sri Wahyu, Endro Gunawan, Sri Hastuti Suhartini, Julia Forcina Sinuraya, Mat Syukur, Nyak Ilham	2020	T	Y	Tidak Lolos
19	Strategi Pemberdayaan Untuk Meningkatkan	Ernawati S.K	2023	Y	T	Tidak Lolos

	Pendapatan Petani Rumput Laut					
20	Implikasi Kualitas Pelayanan Program Keluarga Harapan terhadap Kepuasan Penerima Manfaat di Kelurahan Beji Depok	Muhtadi dan Indah Choirunnisa	2019	Y	T	Tidak Lolos
21	Model Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Covid-19 Melalui Dana Desa Waeheru Kota Ambon	Marno Wance	2022	Y	T	Tidak Lolos
22	Pelaksanaan Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat Dari Program Keluarga Harapan (Studi Pada Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari)	Sri Andini Wa Ode1, Peribad, Nada Kusuma	2024	T	Y	Tidak Lolos

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Kriteria utama dalam *Quality Assessment* dengan kedua kriteria di atas diskriminasi, hanya akan menginklusi literatur yang mengkaji artikel sesuai konteks. Bersamaan dengan pengecekan substansi tersebut, pemeriksaan ketersediaan teks secara utuh juga dilakukan pada proses ini. Dari penyaringan ini, 15 artikel lolos berdasarkan kedua kriteria *Quality Assessment*. Penemuan artikel tersebut akan digunakan sebagai bahan analisis dalam studi literatur. Proses penyaringan artikel tampak sebagai berikut jika digambarkan dalam bentuk diagram alur:



Gambar 1. 9 PRISMA Flow Diagram

Sumber: Diaptasi dari (Liberati et al., 2009)

1.8.4.3 Ekstraksi dan Visualisasi Data

Tujuan dari ekstraksi data adalah untuk merancang formulir yang mencatat secara akurat informasi yang diperoleh peneliti dari studi utama (Kitchenham & Charters, 2007). Pada tahap ini, dilakukan pemetaan jurnal yang mencakup tren tahun penelitian, jurnal yang relevan dengan topik, penulis, dan tulisan yang paling banyak digunakan, disediakan dalam bentuk grafik dan rincian data (Sajida, 2022). Sumber data utama dari *database* elektronik *Google Scholar* akan diolah menggunakan Microsoft Excel untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan. Perhitungan dan pengolahan data menggunakan alat bantuan Microsoft Excel dapat membantu dalam menampilkan diagram grafik untuk visualisasi data. Selain penggunaan Microsoft Excel terdapat juga *VOSviewer* untuk membantu dalam visualisasi data. *VOSviewer* dapat dipakai untuk membuat jaringan jurnal ilmiah, publikasi ilmiah, peneliti, dan kata kunci. Visualisasi data menggunakan Microsoft Excel maupun *VOSviewer* membantu mengidentifikasi pola trend pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dengan berbagai faktor penentu keberhasilannya. Meskipun *VOSviewer* menghasilkan data kuantitatif dalam bentuk jaringan dan frekuensi kemunculan kata, hasil visualisasi yang ditampilkan akan diinterpretasi secara kualitatif. Mengintegrasikan elemen visual dan numerik sebagai alat bantu yang memperkaya analisis. Penelitian ini akan menyajikan hasil terkait

faktor-faktor penentu yang memengaruhi keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia berdasarkan berbagai pelaksanaan kebijakan di berbagai daerah.